

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh banyak pihak seperti calon investor, calon kreditor, manajemen perusahaan dan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut berupa informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang disertai dengan catatan informasi atas laporan keuangan. Bagi pihak manajemen laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan rencana kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang dan untuk pelaksanaan kegiatan operasi sehari-hari. Bagi investor laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk mengambil keputusan untuk menanamkan sahamnya.

Mengingat pentingnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat dan sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Tindakan penyimpangan pada laporan keuangan masih sering terjadi di Indonesia. Tindakan penyimpangan dalam laporan akuntansi ini dapat disebut sebagai salah satu tindakan kecurangan akuntansi seperti penghilangan jumlah dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan

Kecurangan akuntansi atau dalam pengauditan disebut dengan *fraud*, merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada individu atau kelompok tersebut. Kecurangan akuntansi (*fraud*) bisa terjadi di perusahaan

maupun di lembaga keuangan seperti bank dan koperasi . *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak memiliki jabatan. Kecurangan akuntansi adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Korupsi adalah tindakan seorang individu yang secara tidak sah dan tidak benar memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan melanggar peraturan dan hak orang lain. Berdasarkan konsep *Fraud Triangle* terdapat 3 hal yang mendorong terjadinya kecurangan yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Korupsi juga banyak terjadi pada koperasi, koperasi merupakan lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan yang tersebar di berbagai daerah sesuai dengan UUD No.25 Pasal 1 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kecurangan Akuntansi telah berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Misalnya pada Bank BPD Bali yaitu terjadi pembobolan dana deposito milik nasabah sebesar 1,7 Milyar pada tahun 2016 yang melibatkan pegawai Bank BPD Bali cabang Tabanan, pelaku mendepositokan uang nasabah sebesar satu milyar rupiah dan dimasukkan ke sistem komputer. Selanjutnya pengambilan bunga deposito dilakukan oleh pelaku dan buktinya dihapuskan serta diserahkan lagi ke nasabah (Tribunnews, 2016).

Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga terdapat kasus kecurangan akuntansi yang terjadi seperti penipuan dan penggelapan dana sebesar 47 milyar oleh manajer koperasi pada tahun 2019 yang melibatkan Manajer Koperasi

Simpan Pinjam Maha Suci yang berlokasi di Delod Peken Tabanan. Modus yang dilakukan oleh koperasi yaitu datang ke rumah nasabah atau korban dan menawarkan program penyelamatan aset bagi nasabah yang mempunyai masalah atau utang dengan pihak bank atas pinjaman dan angsuran bunga dengan jaminan tanah atau rumah. Koperasi kemudian membantu menyelamatkan aset korban dengan cara menambah pinjaman yang merupakan hasil sisa pinjaman di bank atau BPR yang langsung ditabungkan di koperasi dalam bentuk simpanan berjangka dengan bunga 3 hingga 5 persen. Bunga tinggi yang dijanjikan koperasi ini kemudian digunakan untuk membayar angsuran utang di bank atau BPR. Namun pada kenyataannya, kewajiban koperasi hanya lancar hingga 3 bulan. Setelah tiga bulan, koperasi tidak melaksanakan kewajibannya membayar bunga tabungan para nasabah (Suarna, 2019)

Menurut Sanjiwani (2021) dibandingkan dengan wilayah lainnya Tabanan memiliki 43 koperasi yang bermasalah sedangkan di wilayah lain seperti Buleleng hanya 23 koperasi yang bermasalah (Desiani, 2019) dan di Karangasem hanya terdapat 25 koperasi yang bermasalah (Wikanto, 2016) Selain itu alasan saya memilih Tabanan karena lebih memudahkan dalam akses pemerolehan data dan juga menurut Eka (2018) di Tabanan terdapat 3 koperasi yang termasuk dalam 12 Koperasi ilegal di Bali yaitu KSP Maha Suci, KSP Maha Mulia Mandiri dan KSP Tirta Rahayu yang merugikan hingga 150 Milyar dengan kasus penipuan dan penggelapan uang.

Tindakan kecurangan tersebut dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang lemah dalam suatu perusahaan. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen

dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasaran (Jusup, 2014:356). Lemahnya sistem pengendalian internal merupakan penyebab tertinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh pegawai maupun manajer yang bertanggung jawab menjalankan proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Semakin efektif pengendalian internal didalam suatu organisasi maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan suatu perusahaan karena tidak terbukanya peluang atau kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan. Radhiah (2016), Sariyanti (2017), Wulandari,dkk (2016), Dewi (2019) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Alou, dkk (2017) , Rizky, dkk (2016) menyatakan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Disisi lain penelitian Yuliani (2018) Menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi

Kurangnya Kepuasan kompensasi yang diterima juga dapat memicu kecurangan akuntansi. Kompensasi merupakan imbalan dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajer (*agen*) dengan harapan manajer dapat memenuhi tujuan perusahaan (Sari, 2017:255). Karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang telah diberikan oleh perusahaan. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan pemberian kompensasi yang diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi dan puas terhadap kompensasi yang diberikan sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan kecurangan akuntansi . Dengan kepuasan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya, sehingga dengan kepuasan kompensasi

tersebut karyawan tidak berlaku curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Radhiah (2016), Sariyanti (2017), dan Dewi (2019) menyatakan kepuasan kompensasi berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Bartenputra (2016), Alou,dkk (2017) dan Firdaus (2018) menyatakan kepuasan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Perilaku tidak etis juga memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati (Ansory dan Indrasari, 2018:53) perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang didapat dari perusahaan serta lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Jika perilaku tidak etis dibiarkan maka akan berkembang menjadi bentuk kompleks yang sulit ditelusuri dan menimbulkan akibat yang merugikan sehingga menimbulkan kecurangan dalam akuntansi. Dalam hal ini perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini didukung oleh Dewi (2019) dan Yuliani (2018) yang menyatakan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, Disisi lain Rizky, dkk (2016) menyatakan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan Thoyibatun (2012) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi

Faktor selanjutnya adalah Kultur organisasi, Menurut Schein (1992:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi

dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi. Kultur organisasi sangat penting karena budaya organisasi yang kuat memberikan pengaruh paling besar dalam mengarahkan perilaku yang membuat para karyawan dan segenap satuan dalam koperasi melaksanakan pekerjaan lebih baik. Yuliani (2018) , Wulandari, dkk (2016) menyatakan kultur organisasi berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi.

Terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh penegakan hukum. Menurut Rini (2018) Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegas atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dan juga sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat bekerja selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki tanggung jawab yang bertumpu pada sikap etis, moral dan spiritual. Oktaviani, dkk (2017), Wulandari, dkk (2016) menyatakan penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Firdaus (2018) menyatakan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, disisi lain Rizky, dkk (2017) menyatakan penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang dengan adanya fenomena dan *research gap* dari penelitian sebelumnya, serta untuk mengurangi atau menghindari adanya tindakan kecurangan akuntansi ,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepuasan Kompensasi, Perilaku Tidak Etis, Kultur Organisasi, dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada KSP Se-Kecamatan Tabanan”

1.2 Rumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi Pada KSP Se-kecamatan Tabanan?
2. Apakah kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan?
3. Apakah kultur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan?
4. Apakah pengaruh Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan?
5. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi Pada KSP Se-Kecamatan Tabanan
2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan
3. Untuk mengetahui pengaruh kultur organisasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan

4. Untuk mengetahui pengaruh Perilaku tidak etis terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan
5. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada KSP Se-kecamatan Tabanan

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan analisis kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada koperasi simpan pinjam.
- b) Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai analisis kecenderungan (*fraud*) akuntansi pada koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat Praktis

Bagi Koperasi simpan pinjam di Kecamatan Tabanan, hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) Pada koperasi simpan pinjam, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di Koperasi seperti yang disajikan penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976:308) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan anggota koperasi (*principal*) yang dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Supriyono (2009:184) menyatakan bahwa teori agensi adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan kontrak-kontrak insentif untuk memotivasi para individu mencapai keselarasan tujuan. Agar hubungan kontraktual ini berjalan dengan lancar, anggota koperasi (*principal*) akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer (*agent*). Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer (*agent*) dan anggota koperasi (*principal*) dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*). Yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya terlihat di kontrak.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan

bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak anggota koperasi (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan yang masing-masing ingin mempertahankan dan mencapai kemakuran atau keuntungan yang dikehendaki.

Pemilik perusahaan (*principal*) dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan perusahaan dan mengorbankan kepentingan manajer (*agent*). Untuk mengurangi konflik maka perlu dilakukan pengendalian internal dan juga *monitoring* oleh *principal* atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. *Principal* dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Dengan kompensasi yang sesuai kecurangan akuntansi dapat berkurang.

Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak berlaku curang dalam pelaporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

2.1.2 *Fraud Triangle Theory*

Berdasarkan teori ini ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Ketiga faktor tersebut sering disebut dengan istilah segitiga kecurangan yang terdiri dari *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Tuanakotta (2007:105) menjelaskan bahwa *Fraud Triangle* adalah model untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan pekerjaan termasuk korupsi. Tuanakotta (2007:105) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*)

1) *Pressure*

Tekanan adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Bentuk tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku dan mendorong untuk melakukan sebuah kecurangan. Kondisi tersebut bisa berupa kebiasaan sering berjudi, memakai obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya mengubah jumlah nominal dalam laporan keuangan atau korupsi.

2) *Oppoturnity*

Menurut Pravitasari (2016) kesempatan adalah situasi yang membuka peluang bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Atau bisa di bilang bahwa kesempatan adalah peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya. Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Kemungkinan peluang akan timbul karena pengendalian internalnya lemah, penegakan peraturan yang buruk, pengawasan yang kurang baik atau melalui penggunaan posisi jabatan. Tuanakotta (2007:106) menjelaskan penelitian Cressey yang menyatakan bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi.

3) *Rationalization*

Pravitasari (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur. Rasionalisasi merupakan elemen penting dalam terjadinya kecurangan. Sikap dimana pelaku menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Atau menganggap kesalahan itu bukan merupakan kecurangan.

2.1.3 Kecurangan Akuntansi

Jusup (2014:410) menyatakan bahwa kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang atau pihak

lain. Motivasi seseorang untuk berbuat kecurangan disebabkan karena adanya tekanan dalam diri pelaku kecurangan, baik berupa masalah keuangan, sifat buruk atau lingkungan kerja yang kurang kondusif, seperti diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan dan kondisi kerja yang buruk. Menurut IAI (2001:215) kecurangan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan
- 2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Pelaku kecurangan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan dan karyawan

- 1) Faktor tekanan (*perceived pressure*), yaitu motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud yang disebabkan oleh adanya tekanan, baik tekanan keuangan maupun tekanan non keuangan. Serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi
- 2) Faktor kesempatan atau peluang (*perceived opportunity*), yaitu faktor penyebab korupsi yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu system, dimana seorang karyawan memiliki kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada sehingga ia dapat melakukan perbuatan curang

- 3) Faktor alasan pembenaran (*rationalization*) yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan atau orang-orang yang berada pada keadaan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*

Kecurangan laporan keuangan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) *Timing difirence* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya
- 2) *Fictious Reveneus* yaitu bentuk laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan atau biaya yang sebenarnya tidak pernah terjadi
- 3) *Cancealed liabilities and expanses* yaitu bentuk laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan sehingga laporan keuangan terlihat bagus
- 4) *Implorer disclosure* yaitu bentuk laporan keuangan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan
- 5) *Imporer asset valuation* yaitu bentuk laporan keuangan dengan penilaian yang tidak wajar atau tidak atau tidak sesuai prinsip akuntansi berlaku umum atas asset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Sujarweni (2015:69) sistem pengendalian internal adalah suatu system yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan membuat system pengendalian internal adalah:

- 1) Untuk menjaga kekayaan organisasi
- 2) Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan
- 3) Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan
- 4) Untuk menjaga kedisiplinan dan penerapannya kebijakan manajemen
- 5) Agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan

Sedangkan Jusup (2014:356) menyatakan bahwa system pengendalian internal adalah system yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasaraannya.

Jusup (2014:363) menyebutkan pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak terhadap pentingnya pengendalian oleh satuan usaha tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi untuk semua komponen pengendalian internal yang memberikan keteraturan dan struktur pengendalian yang baik

2) Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola . Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negative mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelola, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi system akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan menganalisa, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang handal

5) Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menekankan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Aktifitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberi petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan

Sariyanti (2017), Radhiah (2016) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alou,dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.1.5 Kepuasan Kompensasi

Kompensasi merupakan imbalan dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajer (*agen*) dengan harapan manajer dapat memenuhi tujuan perusahaan (Sari, 2017:255). Sedangkan Ansory dan Indrasari (2018:231) menyatakan bahwa kompensasi merupakan imbalan jasa yang diberikan secara teratur dan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan kepada para karyawan atas

kontribusi tenaganya yang telah diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan berupa upah dan gaji. Bagi karyawan kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi organisasi kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas (Thoyibatun, 2012). Kepuasan kompensasi merupakan seberapa besar kompensasi yang diberikan organisasi dengan perasaan karyawan yang menerimanya, perasaan puas karyawan dipengaruhi oleh perbandingan dengan apa yang dialami orang lain, dan setiap karyawan berbeda keinginan terhadap kompensasi serta terhadap pentingnya perbedaan kompensasi yang diterimanya. Oleh karena itu organisasi perlu hati-hati dalam mengontrol dan mendesain kompensasi supaya kedua kepentingan tersebut dapat diakomodasi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk menciptakan kepuasan kompensasi yang mampu mendorong karyawan berprestasi secara optimal.

Bagi organisasi kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan.

Sistem kompensasi yang baik merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Menurut Ansory dan Indrasari (2018:232), fungsi kompensasi diantaranya adalah:

- 1) Mendapatkan karyawan berkualitas baik

- 2) Memacu pekerjaan untuk bekerja lebih giat
- 3) Memikat pelamar kerja berkualitas
- 4) Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya
- 5) Memiliki keunggulan lebih dari pesaing atau competitor

Kompensasi bagi manajemen terdiri dari gaji, bonus, dan fasilitas yang diberikan kepada manajemen sebagai imbalan terhadap waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan kepada perusahaan. Kompensasi yang dapat diatur secara taktis dapat membantu timbulnya keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemilik. Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan insentif adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran-ukuran kinerja harus selaras dengan tujuan-tujuan organisasi
 - 2) Para manajer harus dievaluasi kinerjanya berdasarkan variabel-variabel yang secara signifikan dapat dikendalikannya
 - 3) Ukuran-ukuran kinerja harus objektif
 - 4) Ukuran-ukuran atau standar kinerja harus menantang namun memungkinkan untuk dicapai
 - 5) Insentif hendaknya bersaing dengan yang ditawarkan dengan organisasi yang sebanding
 - 6) Sistem insentif hendaknya sederhana dan mudah diadministrasikan
- Penelitian yang dilakukan oleh Radhiah (2016), Dewi (2019) dan Sariyanti (2017) yang menyatakan kepuasan kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Alou, dkk (2017), Firdaus (2018) dan Bartenputra (2016) memperoleh

hasil bahwa kepuasan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi

2.1.6 Perilaku Tidak Etis

Hanafi (2011:74) mendefinisikan etika sebagai studi mengenai hak dan kewajiban seseorang, mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam pengambilan keputusan, dan karakteristik hubungan antar manusia. Perilaku dikatakan etis apabila sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan tidak etis apabila tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati atau dapat disebut sebagai penyalahgunaan kedudukan atau jabatan dalam sebuah organisasi (Ansory dan Indrasari, 2018:53). Perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat dari perusahaan serta lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Perilaku tidak etis dalam laporan keuangan terlihat apabila laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan tidak sesuai dengan fakta dan dilakukan secara sengaja dengan maksud mengambil kepentingan pribadi. Jika perilaku tidak etis dibiarkan maka akan berkembang menjadi bentuk kompleks yang sulit ditelusuri dan menimbulkan akibat yang merugikan

Ansory dan Indrasari (2018:53) menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis yaitu:

- 1) Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan kecurangan adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan sebagai hal yang wajar dilakukan. Adanya standar etika yang berbeda membuat perilaku tidak etis merupakan hal yang sulit untuk dimengerti.
 - 2) Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis. Tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Dewi (2019), Yuliani (2018), menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

2.1.7 Kultur Organisasi

Kultur organisasi menurut pendapat para ahli yaitu :

1. Menurut Moeljono (2005) budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
2. Menurut Robbins (1996:289) Budaya Organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu.
3. Menurut Schein (1992:12) Budaya Organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah,

membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu

4. cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi
5. Menurut Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:263), budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.

2.1.8 Fungsi Kultur Organisasi

Menurut Robbins (1996 : 294), fungsi budaya organisasi sebagai berikut :

1. Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.
2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.
4. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.

Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018), Wulandari,dkk (2016) menyatakan bahwa kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.1.9 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, n.d.)

Menurut Permatasari, *et al.*, (2017) penegakan hukum merupakan tindakan yang nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi karyawan dalam suatu organisasi untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan. Sedangkan penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah.

Penelitian yang dinyatakan oleh Zaka (2018) Penegakan hukum Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kecurangan akuntansi, Novita (2018) Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap Kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Rizky, dkk (2017) menyatakan penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2016) dan Alit, dkk (2017) penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Bartenputra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh kesesuaian kompensasi, ketaatan akuntansi dan asimetri informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bukit Tinggi)”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Radhiah (2016) yang berjudul “Pengaruh Efektivitas pengendalian internal, Kesesuaian kompensasi dan Moralitas Individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Kasus Pada PT. POS Indonesia KCU Kota Pekanbaru)”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sariyanti (2017) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi dan Asimetri Informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengendalian internal, sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh Alou, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan konstruksi di Manado”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi sedangkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*Fraud* pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten)”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asimetri berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, penegakan hukum dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alit, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Praktik Akuntabilitas, *Conflict of interest* dan Penegakan hukum terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Praktik akuntabilitas, *Conflict of interest* berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* sedangkan penegakan hukum berpengaruh positif terhadap potensi *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, Sistem Kompensasi dan Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada KSU Se-Kecamatan Sukawati. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan sistem pengendalian internal dan sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018) yang berjudul “Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kab. Pasaman Barat)”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dan Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi: Studi Pada SKPA Aceh”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum dan Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengendalian internal, keadilan prosedural, kultur organisasi, moralitas individu, asimetri informasi, keadilan distributif, penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap *fraud*/kecurangan

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada :

- 1) Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya menggunakan variabel-variabel : sistem pengendalian internal, kepuasan kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi, dan penegakan hukum, dan juga sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.
- 2) Perbedaannya selain menggunakan variabel diatas penelitian sebelumnya menggunakan variabel ketaatan akuntansi, asimetri informasi moralitas individu, moralitas manajemen, keadilan prosedural, keadilan distributive, praktik akuntabilitas, *Conflict of interest*, dan perbedaan tempat penelitian sebelumnya menggunakan SKPD, SKPA, instansi pemerintahan, bank, PT pos, KSU dan BPD sedangkan pada penelitian ini menggunakan KSP Se-Kecamatan Tabanan sebagai tempat penelitian